

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam posisi yang sejajar antara satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Melalui sistem ini, rakyat mempunyai hak yang sebebas-bebasnya untuk menentukan sendiri pilihannya, baik itu dalam pemilihan umum presiden maupun pemilu legislatif yang nantinya akan memimpin dan menempati lembaga-lembaga perwakilan

suatu Negara. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya suatu proses demokratisasi suatu Negara dimana indikatornya bisa dilihat dari beragamnya partai-partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Secara administrasi pemerintahan, Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 349 Kabupaten, 91 Kota, 5.263 Kecamatan, 7.123 Kelurahan dan 62.806 Desa<sup>1</sup>. Seperti dinyatakan dalam Konstitusinya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pendirian Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia memerlukan suatu pengaturan administrasi pemerintahan yang cocok, dan desentralisasi merupakan salah satu opsi untuk membawa unit-unit administrasi dan pelayanan publik sedekat mungkin dengan masyarakat yang tersebar di berbagai tempat. Ini juga menjelaskan mengapa sejak negeri ini didirikan, kebijakan desentralisasi telah diterapkan oleh semua pemerintahan di Indonesia meskipun dengan tingkatan dan cakupan yang berbeda-beda seperti dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan tentang desentralisasi.

Secara hukum, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah (pusat) kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2005.

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>. Secara demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pengalihan kekuasaan (wewenang atau urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terpilih dalam hal otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diberlakukan untuk daerah-daerah otonom yang dimengerti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Sebagai bagian dari demokratisasi, desentralisasi juga untuk memastikan berlangsungnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Inilah yang sekarang diterapkan di Indonesia<sup>4</sup>. Tujuan desentralisasi adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Salah satu wujud aplikasi dari desentralisasi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau kemudian disingkat pilkada. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pergantian kekuasaan secara damai untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dasar hukum Pilkada di Indonesia adalah Undang Undang No 32 Tahun 2004 dan Peraturan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Huruf e UU No 22/1999 dan pasal 1 angka 7 UU No 33/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Ibid Huruf I, Angka 6.

<sup>4</sup> Guy Benveniste, *Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, Hal. 233.

Pemerintah No.6 Tahun 2005 yang merupakan implementasi semangat amandemen UUD 1945 pasal 18 ayat 4.

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Jawa Tengah. Bagi provinsi Jawa Tengah pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur adalah untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Juni 2008 walaupun pilkada kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah sudah ada yang menyelenggarakannya sejak dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, warga yang memiliki hak pilih pada Pilihan gubernur Jawa Tengah sebanyak 25.861. 234 pemilih yang tersebar di 55.603 tempat pemungutan suara (TPS). Urutan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**NAMA & NOMOR URUT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2008**

| ①   | ②   | ③   | ④  | ⑤   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| CALON GUBERNUR<br><b>H. Bambang Sadono, SH., MH.</b>                                | CALON GUBERNUR<br><b>H. Agus Soeyitno</b>   | CALON GUBERNUR<br><b>H. Sukawi Sutarip, SH., SE.</b>                                | CALON GUBERNUR<br><b>H. Bibit Waluyo</b>   | CALON GUBERNUR<br><b>Ir. H. Muhammad Tamzil, MT.</b>                                  |
| CALON WAKIL GUBERNUR<br><b>Drs. H. Muhammad Adnan, MA.</b>                          | CALON WAKIL GUBERNUR<br><b>Drs. H. Abdul Kholliq Arif, M.Si.</b>                    | CALON WAKIL GUBERNUR<br><b>Dr. Sudharto., MA.</b>                                   | CALON WAKIL GUBERNUR<br><b>Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si.</b>                         | CALON WAKIL GUBERNUR<br><b>Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM.</b>                          |

Gambar 1.1 nama dan nomor urut cagub dan cawagub Jateng 2008

Pemilih Jawa Tengah yang menggunakan hak pilihnya sekitar 58,52%. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pilkada di provinsi-provinsi lain yang rata-rata di atas 60%. Rendahnya

tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tersebut memilih golput atau golongan putih.

Pada Pilkada Jawa Tengah tersebut, pasangan nomor urut 4 yaitu Bibit Waluyo dan Rustriningsih keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebesar 43,44% dan suara golput mencapai 41,54% angka yang cukup besar. Bila dibandingkan dengan hasil Pilkada Jawa Barat yang dimenangkan oleh pasangan “HADE” yang memperoleh suara sebesar 40,03% dan suara golput mencapai 32,72%. Juga dengan Pilkada Jawa Timur putaran pertama yang dimenangkan oleh pasangan “KARSA” yang memperoleh suara sebesar 24,82% dan suara golput mencapai 38,20%. Hasil lengkap perolehan suara Pilkada Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pilkada Jawa Tengah 2008

| Jumlah Pemilih | Jumlah Suara Sah |         |           |           |           | Jml Suara Sah | Suara Tidak Sah | Total Suara | Golput     |
|----------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|
|                | 1                | 2       | 3         | 4         | 5         |               |                 |             |            |
| 25.855.542     | 3.192.093        | 957.343 | 2.182.102 | 6.084.261 | 1.591.243 | 14.007.042    | 1.109.348       | 15.116.390  | 10.739.152 |
| Dalam %        | 22,79            | 6,83    | 15,58     | 43,44     | 11,36     | 92,66         | 7,34            | 58,46       | 41,54      |

Sumber : KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2

Perolehan Suara Pilkada Jawa Barat 2008

| Jumlah Pemilih | Jumlah Suara Sah |          |           | Golput    |
|----------------|------------------|----------|-----------|-----------|
|                | 1                | 2        | 3         |           |
| 27,9 Juta      | 6,21 Juta        | 4,4 Juta | 7,28 Juta | 9,13 Juta |
| Dalam %        | 34,55            | 24,95    | 40,03     | 32,72     |

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.3

## Perolehan Suara Pilkada Jawa Timur Putaran Pertama

| Jumlah Pemilih | Jumlah Suara Sah |           |           |           |           | Golput    |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | 1                | 2         | 3         | 4         | 5         |           |
| 28,1 Juta      | 4.223.089        | 3.605.106 | 3.290.448 | 1.397.291 | 4.498.332 | 11,1 Juta |
| Dalam %        | 24,82            | 21,19     | 19,34     | 8,21      | 26,44     | 38,20     |

Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur

Golput telah ada sepanjang sejarah politik bangsa-bangsa, walau dengan alasan dan konteks yang berbeda-beda. Dan karena perbedaan konteks inilah maka masyarakat harus jeli dan obyektif menyikapi fenomena golput, khususnya hal-hal yang melatarbelakangi kemunculan golput di tiap periode Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955, di tengah maraknya kehidupan kepartaian di Indonesia, golput muncul karena didorong oleh persetujuan yang cenderung saling intimidatif antara kaum unitaris dan kaum federalis.

Sementara golput pada tahun 1980-an hingga 1990-an, lebih dilatarbelakangi karena adanya “paksaan” yang sistematis untuk memilih Golkar sebagai partai pemerintah. Akhirnya gerakan golput menjadi pilihan bagi orang-orang yang takut memilih partai lain di luar Golkar. Golput pada era ini lebih dimotivasi oleh semangat perlawanan terhadap rejim otoriter, yang tidak memberi ruang gerak bagi masyarakat untuk berekspresi, berpolitik dan bersikap beda. Dan semangat ini tetap mewarnai gerakan golput setidaknya hingga akhir tahun 1990-an. Sedangkan, golput pada era pasca Orde baru cenderung bukan lagi disemangati oleh perlawanan terhadap rejim yang berkuasa, melainkan oleh kekecewaan yang mendalam terhadap sikap para pemimpin pemerintahan, para elite politik dan partai yang dinilai

mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Pada Pemilu 2004, sikap golput secara umum lebih dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada pemerintah yang dianggap tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya.

Dari beberapa penjelasan mengenai sikap golput di atas, terlihat sekali bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih sikap golput. Pada pemilihan gubernur Jawa Tengah ini, sikap golput juga menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari persentase partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang hanya 58,52% menggunakan hak pilihnya.

Seperti halnya Golput pada tahun 70-90an, saat ini pun pada Pilkada Jawa Tengah Golput banyak dipilih oleh para kaum muda terutama para mahasiswa yang sangat mengerti tentang sistem demokrasi. Banyak sekali konteks pemikiran yang membuat para mahasiswa memilih Golput pada Pilkada Jawa Tengah, karena tidak seperti jaman Orde Baru yang hanya ada tiga pilihan terutama Golkar sebagai partai penguasa yang selalu menang dalam setiap Pemilu.

Beda dengan keadaan sekarang ini dimana demokrasi telah dijunjung tinggi dan masyarakat bebas menggunakan haknya dengan begitu banyaknya partai, sehingga masyarakat terutama mahasiswa bebas memilih partai sesuai dengan visi misi yang sama. Tetapi setelah Pilpres 2004 dan dilanjutkan dengan Pilkada langsung di seluruh wilayah Indonesia angka Golput semakin meningkat dan pada Pilkada Jawa Tengah angka Golput yang paling tinggi.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kaum intelektual terutama mahasiswa memilih menjadi Golput.

Keterlibatan mahasiswa dibidang politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Dalam kaitan untuk merealisasikan tercapainya kehidupan politik yang semakin demokratis tentu bukan hanya menjadi tugas partai politik, meskipun partai politik harus memainkan peran yang penting, melainkan juga menjadi tugas mulia seluruh komponen masyarakat terutama mereka para generasi muda yang terdidik seperti mahasiswa.

Ada dua dimensi yang harus diperhatikan dalam keterlibatan mahasiswa dibidang politik<sup>5</sup> :

*Pertama*, posisi mahasiswa sebagai pemimpin masa depan atau kader bangsa. Dalam posisi ini, mahasiswa tidaklah cukup diperlakukan sebagai calon politisi. Yang lebih penting adalah menempatkan mereka sebagai calon negarawan.

*Kedua*, posisi mahasiswa sebagai pemilih yang tak mungkin diabaikan salah satu partai politik.

Perkembangan politik di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran serta mahasiswa. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa merupakan motor penggerak perubahan demokrasi di Indonesia. Adanya gerakan Budi Utomo sampai pada gerakan Mei 1998 yang semuanya membawa perubahan bagi kehidupan perpolitikan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Jayadi, *Kampanye dan Politisasi Pelajar*, Republika Mei 2003, Hal. 3.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fenomena Golput yang saat ini terjadi sangat menarik untuk diteliti terutama para mahasiswa sebagai pemilih intelektual untuk menjadi Golput. Maka selanjutnya penelitian ini difokuskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan mahasiswa sebagai pemilih untuk menjadi Golput pada Pilkada Jawa Tengah 2008.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka untuk lebih mengarah kepada pembicaraan mengenai permasalahan tersebut di atas maka penyusun merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Pertimbangan Mahasiswa Sebagai Pemilih Untuk Menjadi Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2008” ?

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbuan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan reposisi untuk menerangkan suatu fenomena dengan cara merumuskan hubungan antar konsep<sup>6</sup>. Menurut definisi ini teori mengandung dua hal. *Pertama*, Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu

---

<sup>6</sup> Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hlm. 19.

fenomena sosial dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Menurut Koentjaraningrat, teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat<sup>7</sup>.

### **1. Pilkada Langsung**

Pemilihan Kepala Daerah langsung berarti mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Diharapkan dengan pemilihan Kepala Daerah langsung ini menciptakan suasana politik lokal yang berorientasi terhadap input dari rakyat dalam merumuskan sebuah kebijakan publik. Dengan terpenuhinya keinginan baik itu tuntutan dan dukungan rakyat maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketika adanya sebuah kerukunan dalam masyarakat berarti pemerintah telah berhasil membuat kebijakan publik yang memenuhi kepuasan publik sehingga berimplikasi pada stabilnya konstelasi politik daerah. Dalam konteks ini, Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk yang mengatur kehidupan rakyat.

Sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pemilihan Kepala Daerah langsung mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut<sup>8</sup> :

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 19.

<sup>8</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 128-131.

- a. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena dukungan oleh rakyat yang memberikan suara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau Kepala Daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
- b. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang mencalonkan kandidat. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali bersebrangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan Pemerintah Daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
- c. Sistem pemilihan Kepala daerah langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau electoral college secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih

kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.

- d. Checks and balance antara legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
- e. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung ini tentunya mempunyai beberapa kekurangan salah satunya adalah sebagai berikut :

- a. Dana yang dibutuhkan besar

Dana yang dibutuhkan dalam pemilihan Kepala Daerah langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik, maupun keamanan. Besarnya dana ini memberikan beban yang berat kepada Daerah, apalagi pemilihan Kepala Daerah menggunakan sistem dua putaran (two round atau run-off system), ditengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

- b. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung sangat besar. Konflik terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah langsung bersifat elite namun lebih besar kemungkinannya bersifat

massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, dimana pemimpin (patron) dapat memobilisasi pendukungnya (client).

c. Aktivitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyesuaikan kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver yang dilakukan oleh para calon lawan.

Adapun manfaat dari pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung bagi perkembangan atau peningkatan demokrasi di Daerah. Manfaat tersebut bagi Indonesia dan Daerah ke depan mencakup<sup>9</sup> :

a. Pendidikan politik

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon, dan pentingnya program kerja (visi dan misi), kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi.

b. Kancan pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan kancan pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam suatu Bangsa. Pengalaman di Negara-negara maju federasi menunjukkan hasil pemilu parlemen lokal dan pemilihan Kepala Daerah berpengaruh terhadap

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 132-139.

pusat. Mereka yang tidak mempunyai atau kehilangan peluang partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah atau pembuatan kebijakan. Dengan kehendak melakukan partisipasi politik, masyarakat akan melakukan usaha untuk mengakses informasi yang cukup tentang berbagai hal. Mereka akan mencari tahu syarat menjadi calon, siapa yang maju sebagai calon, bagaimana kapasitas dan latar belakangnya, apakah calon pantas didukung atau tidak dan sebagainya<sup>10</sup>.

c. Pilkada langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menciptakan sebuah landasan bagi prospektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik, serta menyusun anggaran. Dari para pemimpin di tingkat lokal diharapkan mampu melahirkan politisi-politisi nasional yang handal. Pemilihan Kepala Daerah langsung akan sangat bermanfaat sebagai wahana meniti karier politik.

d. Membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme

Partisipasi masyarakat dalam politik formal melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan praktik-praktiknya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Dengan cara itu dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan, dan stabilitas politik. Dengan terciptanya harmoni sosial maka akan mengurangi potensi dari separatisme.

---

<sup>10</sup> Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002, hal. 5.

e. Kesetaraan politik (political equality)

Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih Kepala Daerah. Di samping itu, warga baik secara sendiri-sendiri atau kelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Partisipasi yang luas mengandung di dalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional atau pejabat yang lebih tinggi biasanya kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah.

f. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat

Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Dengan pemilihan Kepala Daerah langsung, kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin dan kelompok marginal, serta perempuan.

g. Akuntabilitas publik

Akuntabilitas diperkuat karena pemilihan Kepala Daerah langsung lebih accessible terhadap penduduk setempat dan oleh karenanya akan

lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya, dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. Satu suara dalam pemilihan lokal merupakan suatu mekanisme unik bagi penduduk untuk menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Kepala Daerah.

h. Meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan masyarakat

Sensitifitas Pemerintah meningkat karena Kepala Pemerintah ditempatkan secara tepat, dengan pemilihan langsung itu, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan bagaimana agar kebutuhan tersebut dapat di penuhi dengan cara-cara efektif.

## **2. Golongan Putih (golput)**

Fenomena kemunculan Golongan Putih atau Golput di Indonesia semakin meningkat setelah pemilihan Presiden 2004 yang dilanjutkan dengan diadakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan gelaran pemilihan Kepala Daerah secara langsung denyut politik di Daerah diharapkan dapat menggeliat. Meskipun begitu, tidak serta merta membangkitkan harapan warga. Indikatornya, sejak pemilihan Presiden 2004, proporsi warga yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah pemilih terdaftar cukup tinggi.

Tiada asap tanpa api, demikian kira-kira pepatah yang tepat untuk memahami eksistensi golongan putih. Golongan Putih tidak terjadi secara serta merta, tanpa ada penyebabnya. Golongan Putih telah ada sepanjang sejarah politik bangsa-bangsa, kendati dengan alasan dan konteks yang

berbeda-beda. Pada Pemilihan Umum 1955, di tengah maraknya kehidupan kepartaian di Indonesia, golongan putih muncul karena di dorong oleh perseteruan yang cenderung saling intimidatif antara kaum unitaris dan kaum federalis.

Sementara Golongan Putih pada tahun 70-an hingga 90-an, lebih dilatarbelakangi karena adanya paksaan yang sistematis untuk memilih Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah. Akhirnya gerakan Golongan Putih menjadi pilihan bagi orang-orang yang takut memilih partai lain di luar Golongan Karya. Golongan Putih pada era ini lebih di motivasi oleh semangat perlawanan terhadap rejim otoriter, yang tidak memberi ruang gerak bagi masyarakat untuk berekspresi, berpolitik, dan bersikap beda. Orang-orang Golongan Putih seperti di katakan Arief Budiman, salah seorang pencetus berdirinya Golongan Putih tahun 1971 ada yang murni dan ada yang kecelakaan. Kalau yang murni tidak mau memilih berdasarkan kesadaran, sedangkan yang kecelakaan karena memang benar-benar tidak mengerti atau lagi ada halangan<sup>11</sup>.

Secara spesifik dapat dibedakan dua fokus protes Golongan Putih terhadap Pemilu setelah tahun 1971. Pertama, ialah memprotes proses pemilu sebagai mekanisme bagi pembentukan legitimasi bagi format politik Orde Baru yang mampu menegakkan stabilitas politik akan tetapi menjurus kepada pemusatan kekuasaan dan berwatak penekan. Kedua, Golongan Putih merupakan gerakan protes terhadap proses Pemilu sebagai

---

<sup>11</sup> Sanit Arbi, *Golput Aneka Pandangan Fenomena Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 11.

mekanisme legitimasi bagi kebijaksanaan dan kegiatan pembangunan yang berhasil meningkatkan penghasilan nasional akan tetapi diwarnai oleh berbagai kesenjangan<sup>12</sup>.

Dengan kata lain, Golongan putih telah tumbuh menjadi acuan sikap dalam berhadapan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, malah menjadi sikap pandang tentang proses dan arah perkembangan sistem politik. Itu berarti bahwa sikap keGolputan dalam Pemilu merupakan muara bagi sikap kritis dan kekecewaan ataupun ketidakpuasan warga masyarakat terhadap proses politik yang mereka alami atau mereka rasakan.

Demikian pula Golongan Putih pada Pemilu 2004 yang secara umum lebih dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada Pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis yang saat itu masih terjadi dari dampak krisis 1998. Disamping itu, terjadinya polarisasi kepemimpinan politik dalam masyarakat pun mendorong terjadinya Golput atas dasar simbiosis antara patron dan clientnya manakala sang patron tidak terakomodasi dalam struktur politik tertentu.

Dalam teori politik, Golput dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga Negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak warga Negara yang mengandung kebebasan pemilik hak itu untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Dengan demikian, harusnya para pemimpin membuka mata hatinya manakala menemukan

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 31.

kenyataan Golput, berapapun besarnya. Menurut Gandung Ismanto Golput mengindikasikan adanya beberapa hal berikut ini<sup>13</sup> :

- a. Perlawanan terhadap rejim.
- b. Ketidakpercayaan terhadap sistem dan calon yang ada.
- c. Kekecewaan yang besar terhadap Pemerintah dan sistem.
- d. Putusnya harapan rakyat akan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang mampu mengayomi mereka.

Dan terkadang, hanya dengan cara demikian kemapanan demokarasi yang mengandalkan berfungsinya check and balance itu dapat tercipta, kendati tidak selalu demikian adanya.

Dalam konteks sosiologi politik, dijelaskan empat sebab sikap Golput, yaitu<sup>14</sup> :

- a. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya.
- b. Sinisme politik, merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa sermua politisi tidak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang yang tidak amanah.

---

<sup>13</sup> Gandung Ismanto, Artikel, *Memahami Eksistensi Golput Dalam Demokrasi*, Dosen FISIK UTIRTA, Pemerhati Sosial Politik.

<sup>14</sup> Ibid,

- c. Alienasi, merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan Pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.
- d. Anomi, yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tidak termotivasi untuk mengambil tindakan berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Dalam makalah yang ditulis Joko J Prihatmoko yang berjudul *Mengukur kapasitas sistem Pilkada* mengatakan bahwa tingginya angka Golput dalam Pilkada langsung disebabkan sekurang-kurangnya tiga faktor yaitu antara lain<sup>15</sup> :

- a. Ketidakpercayaan terhadap para kandidat, carut marut panggung politik 1999-2004 merupakan preseden yang menjatuhkan kepercayaan para politisi. Merosotnya kepercayaan itu terlihat dari rendahnya partisipasi pemilih Pilkada di daerah perkotaan. Artinya fenomena Golput Pilkada langsung dekat dengan pemilih kelompok kelas menengah, yang dikenal kritis dan memiliki akses informasi yang baik.
- b. Kejenuhan terhadap hiruk pikuk politik, kejenuhan itu diindikasikan dengan banyaknya birokrat atau pejabat menjadi Kepala Daerah terpilih.
- c. Kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan banyaknya calon pemilih kurang tahu siapa yang akan dipilihnya serta tentang tata cara pencoblosan dan tempatnya sering menjadi kendala.

---

<sup>15</sup> Joko J Prihatmoko, Artikel, *Mengukur Kapasitas Pilkada*, Staf Pengajar dan Peneliti, Universitas Wahid Hayim Semarang.

Dari beberapa teori dan pendapat tentang Golput yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih untuk bersikap Golput antara lain :

- a. Faktor Teknis yaitu seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar tetapi tidak punya kartu suara, termasuk juga orang meninggal yang masih terdaftar, atau juga bayi yang sudah terdaftar, orang yang terdaftar dua kali, serta orang yang mencoblos lebih dari satu pilihan, dan orang yang salah mencoblos.
- b. Faktor Pragmatis yaitu seseorang yang ingin mencoblos, tetapi ada kesulitan karena sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa mendatangi TPS, kerja sepanjang hari meski hari libur, atau sedang sakit.
- c. Faktor Pribadi yaitu orang yang merasa tidak punya calon yang sesuai dengan keinginan hatinya, ia menganggap semua calon bermasalah dan hanya memanipulasi janji-janji kampanye belaka, serta orang yang masa bodoh dan tidak peduli terhadap politik.
- d. Faktor Politis yaitu seseorang yang tidak yakin pemilihan langsung akan berdampak pada perbaikan mutu pemimpin dan kualitas pelayanan pemerintah terhadap warganya. Baginya, pemilihan langsung hanya buang-buang energi, biaya, dan waktu, sedangkan dampaknya bagi masyarakat dan kehidupan demokratis adalah nol besar, bahkan ia lebih suka Gubernur dipilih langsung oleh Presiden seperti sebelumnya.

- e. Faktor Patron Politis yaitu seorang anggota atau simpatisan partai politik yang tidak mempunyai calon atau partainya menyatakan bahwa anggotanya bebas memilih. Termasuk dalam hal ini adalah para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang Golput. Meski tidak menyerukan Golput secara terang terangan, masyarakat yang meneladaninya lebih suka untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor Ideologis yaitu seorang yang yakin bahwa demokrasi adalah sistem politik yang berasal dari barat dan tidak sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya, sehingga ia menentang bentuk turunan dari demokrasi tersebut, termasuk pemilihan pemimpin. Jadi bukan calon dan teknisnya yang ditentang, melainkan sistem demokrasinya yang ia anggap tidak sesuai dengan ideologinya.

### **3. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah<sup>16</sup>.

Herbert MC Closky memberi pengertian pada partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Negara melalui mana mereka

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia Jakarta, 1981, hal. 1.

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum<sup>17</sup>.

Hal senada disampaikan juga oleh beberapa sarjana yang meneliti partisipasi politik masyarakat Demokrasi Barat seperti Gabriel Almond, Norman H. Nie dan Sidney Verba<sup>18</sup>. Akan tetapi beberapa sarjana yang banyak mempelajari Negara-negara Komunis dan masyarakat sedang berkembang cenderung untuk berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercapai dalam partisipasi politik karena sukar sekali membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dengan kegiatan yang dipaksa secara terselubung, baik oleh penguasa maupun kelompok lain<sup>19</sup>. Sebagaimana disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joma M Nelson bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif<sup>20</sup>.

Kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat

---

<sup>17</sup> Herbert Closky, *Political Partisipation*, International Enciclopedia of the Social Science, Edisi ke 2 New York, The Macmillan company and the Free Pres, 1972, XII, hal. 252.

<sup>18</sup> Miriam Budiarto, op.cit., hal. 3.

<sup>19</sup> Ibid,

<sup>20</sup> Ibid, hal. 2.

pemerintah atau parlemen dan sebagainya<sup>21</sup>. Bahkan dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik tidak hanya yang berkenaan dengan pemilu tetapi segala kegiatan yang berkenaan dengan kekuasaan politik dan usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah seperti demonstrasi. Petisi dan oposisi, adalah bagian dari partisipasi politik. Perwujudan riil dari partisipasi politik di atas dalam sistem politik Negara di Negara-negara yang penduduknya heterogen seperti Indonesia, Malaysia, Prancis dsb, dimana terdapat bermacam-macam perbedaan sosial seperti ras, suku, agama, dan status. Maka golongan-golongan dalam masyarakat akan cenderung untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya. Maka dari itu dianggap bahwa pola multi partai lebih mampu menyalurkan keanekaragaman budaya dan politik dalam suatu masyarakat daripada pola dwi partai, yang hanya ada partai berkuasa dan partai oposisi. Karena pada kenyataannya partai-partai oposisi kurang jelas peranannya, mereka kurang aktif menyusun rencana kebijakan sebagai alternatif bagi kebijakan pemerintah yang dikecamnya.

Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang, karena partai-partai dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya dari suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 1.

jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi. Ketentuan ini memberi kesempatan bagi tumbuhnya partai-partai baru<sup>22</sup>.

Secara umum partisipasi politik berbentuk memberikan suara dalam Pemilu. Lebih dari itu, memimpin partai politik atau menjadi anggotanya, menghadiri kampanye, demonstrasi, dan segala aktifitas yang berdampak politik adalah bagian dari partisipasi politik. Memberikan suara dalam Pemilu tidak bisa dijadikan dasar mutlak untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat. Lagi pula Pemilu hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi, masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinyu dan tidak terbatas pada Pemilu saja.

#### **D. Definisi Konsepsional**

Ilmu sosial banyak sekali menggunakan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang dinamakan *konsep*. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas<sup>23</sup>. Jadi definisi konsepsional merupakan definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

- a. Faktor-faktor adalah suatu hal yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 27.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Jakarta*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 148.

- b. Golongan Putih (Golput) adalah suatu identifikasi bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dengan alasan dan konteks yang berbeda-beda.
- c. Pilkada langsung adalah suatu pemilihan kepala daerah dimana rakyat langsung memilih tanpa harus menitipkan suaranya kepada wakil rakyat atau anggota legislatif, sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon Kepala Daerah.
- d. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung, dimana hal itu mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- e. Mahasiswa adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, institusi, akademi, dan lainnya yang sederajat.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut<sup>24</sup>.

Adapun variabel-variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi Golput dapat dilihat dari :

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 152.

1. Faktor Teknis
2. Faktor Pragmatis
3. Faktor Pribadi
4. Faktor Politis
5. Faktor Patron Politis
6. Faktor Ideologis

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih untuk menjadi Golput dalam Pilkada di Jawa Tengah 2008.
- b. Untuk memberikan masukan terhadap pemecahan masalah dalam menghadapi Golput pada Pemilu.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman mengenai studi Golput di Indonesia, juga bisa memperkaya perdebatan mengenai Golput.

#### b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegunaan praktis bagi KPUD, untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor seseorang memilih Golput.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan, secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki<sup>25</sup>.

### **4. Unit Analisis**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemilih untuk menjadi golongan putih pada Pilkada Jawa Tengah 2008. Adapun yang jadi unit analisis dalam penelitian ini adalah : mahasiswa Jawa Tengah sebagai pemilih dalam Pilkada Jawa Tengah 2008.

### **5. Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah teknik *random sampling* atau pengambilan sampel secara acak, dimana sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 63.

sehingga tiap unit penelitian mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel<sup>26</sup>.

Dalam penentuan ukuran sampel menurut pendapat yang diungkapkan oleh (Singarimbun, M dan Effendy, S, 1995) dimana sampel dalam suatu penelitian tergolong dalam sampel besar, maka sampel yang diambil minimal 30 responden, namun karena di Indonesia tingkat *responratelya* kurang dari 50%, untuk mempermudah ditambah 30 responden, maka responden yang digunakan sebanyak 60 responden dan untuk mengantisipasi kesalahan ditambah 4 responden. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 64 responden.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### a) Teknik Dokumentasi

Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka, adapun data tersebut memiliki sumber sebagai berikut :  
buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, dan data dari internet.

### b) Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan

---

<sup>26</sup> Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Ciepta, Jakarta, hal. 127.

wawancara)<sup>27</sup>. Wawancara mendalam terhadap responden atau obyek yang dipilih.

c) Angket

Teknik mengumpulkan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini respondenya adalah : mahasiswa asal Jawa Tengah.

## 7. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini melalui penyebaran kuisisioner kepada mahasiswa asal Jawa Tengah dan wawancara terhadap pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan documenter, yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini melalui referensi-referensi seperti Koran, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada langsung Jawa Tengah 2008.

## 8. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu<sup>29</sup> :

---

<sup>27</sup> Moh Nazir, op.cit., hal. 234.

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 64.

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 12.

a) Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pengukuran, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya penelitian.

b) Sajian data

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan untuk dilakukan. Dengan melihat sesuatu penyajian data, peneliti akan mengerti tentang apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

Dari sajian data yang telah tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

Setelah diambil kesimpulan dalam tiap-tiap butir pertanyaan, maka untuk mengetahui rata-rata dari kesimpulan tersebut digunakan skala indeks.

Rumus mencari indeks :

$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

Sedangkan perhitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$Interval = \frac{NilaiTertinggi - NilaiTerendah}{BanyaknyaKriteria}$$

$$Interval = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dengan kategori :

3,01 – 3,75 = termasuk kategori tinggi

2,26 – 3 = termasuk kategori sedang

1,6 – 2,25 = termasuk kategori rendah

0,75 – 1,5 = termasuk kategori sangat rendah